Trauma atas Konflik dan Kekerasan: Tinjauan Akademik

G. Budi Subanar

Abstrak. *Artikel ini mengajak kita merekapitulasi kajian tentang trauma, konflik dan kekerasan di Indonesia yang pernah diselenggarakan di Program Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma. Tema tersebut cukup penting sebagai bahan kajian maupun materi pembelajaran karena meningkatnya eskalasi konflik dan kekerasan kolektif yang terjadi di berbagai negara dan berbagai daerah di Indonesia. Di samping mempelajari munculnya fenomena kekerasan tersebut juga dipelajari efek-efek traumatis, ingatan serta dicari jalan keluar usaha rekonsiliasi maupun perdamaian. Ada tiga mata kuliah yang ditawarkan di program pendidikan, di antaranya"Teologi Rekonsiliasi Sosial", "memori dan Politik Ingatan", dan "Estetika dari Wilayah Konflik". Lebih dari itu, beberapa penerbitan juga dilakukan sebagai hasil kajian dan evaluasi atas proses akademik yang sudah dilakukan.*

Pengantar

Konflik dan kekerasan telah meninggalkan pengalaman traumatik yang mengundang kajian akademik yang masih berlangsung. Pengalaman-pengalaman yang terkait dengan sejarah *holocaust*, berakhirnya rejim komunis di Eropa Timur, serta politik *apartheid* di Afrika Selatan merupakan wilayah subur yang menghasilkan kajian beragam tentang hal itu. Keragaman kajian keilmuannya, baik dari disiplin ilmu khusus sampai yang kajian interdisipliner. Masyarakat Indonesia juga mempunyai sejarah konflik dan kekerasan dengan dinamikanya sendiri serta trauma yang ditinggalkannya. Bagaimana pengalaman tersebut didekati dan diolah? Beberapa mata kuliah (pernah) diselenggarakan pada Program Pascasarjana Universitas Sanata Dharma dalam usaha mencoba merespon terhadap masalah tersebut untuk

kasus di Indonesia. Tulisan berikut merupakan usaha melacak ulang usaha yang pernah dilakukan, beserta pertanggungjawaban akademik yang mendasarinya.

Konteks

Peralihan rejim Orde Baru ke rejim Reformasi merupakan pengalaman masyarakat Indonesia dalam mengalami perubahan pendulum dari pemerintahan di bawah rejim otoriter dengan ideologi pembangunan (*development*) beralih pada rejim pemerintahan yang mendorong demokratisasi. Perubahan semacam ini ditandai dengan berbagai gejolak, antara lain konflik dan kekerasan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis. Mengingat, di bawah rejim ororiter, segala hal direpresi. Dengan pengalaman keterbukaan, hal-hal yang direpresi muncul ke permukaan. Konflik dan kekerasan menjadi fenomena yang muncul ke permukaan. Konflik pada tingkatan vertikal terkait dengan tuntutan atas berbagai praktik kekerasan negara dan pelanggaran berat kemanusiaan dari rejim lama. Muncul tuntutan untuk memperoleh pengakuan hak dan rehabilitasi, serta kompensasi.[70] Di sisi lain muncul kecenderungan impunitas. Demikian pun, konflik dan kekerasan pada lapisan horizontal berlangsung karena dengan keterbukaan, gerakan yang menggunakan ideologi ekstrim mendapat tempat dan hak hidup, sehingga membuka potensi saling berbenturan.

Penanganan atas pengalaman traumatik dalam sejarah kekerasan sebelumnya telah menghasilkan kajian (eksplorasi) akademik. Berbagai teori dan pendekatan berlangsung. Teori dan konsep-konsep ini dipinjam, atau dikembangkan karena kekhasan masing-masing. Teori-teori kekerasan, konsep rehabilitasi dan rekonsiliasi, konsep impunitas merupakan hasil refleksi para ilmuwan atau korban *holocaust*. Perkembangan selanjutnya, perubahan yang mengandung trauma konflik dan kekerasan setelah runtuhnya komunisme di Eropa Timur, dan hapusnya politik *apartheid* di Afrika selatan. Sampai saat ini pendulum pencarian ini masih terus berlangsung. Dalam pengolahan masalah tersebut tiga pihak ditempatkan, pelaku, korban dan pihak ketiga yang tidak bisa cuci tangan, melepaskan diri dari permasalahan yang dihadapi.

70 Kebijakan untuk penanganan bidang tersebut pernah menghasilkan UU KKR yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

1. Eksplorasi akademik yang berlangsung

Ada sejumlah ilmuwan dan pemikir kemanusiaan dari berbagai disiplin mewariskan pandangannya terkait dengan konflik dan kekerasan dari pengalaman *holocaust* yang telah mulai jauh sebelum Perang Dunia II. Peristiwa runtuhnya komunisme di Eropa Timur yang memunculkan *genoside* dari negara eks Soviet, genoside di Rwanda, serta berakhirnya politik *apartheid* di Afrika Selatan juga turut mengaktifkan kajian akademik atas konflik dan kekerasan. Kajian-kajian tersebut turut menyertai usaha-usaha rehabilitasi dan rekonsilisasi untuk keluar dari trauma terhadap kemanusiaan. Sejumlah pemikir di bidang ilmu sosiologi, politik, sejarah, antropologi, psikologi, filsafat, teologi, dan beberapa disiplin ilmu lain dengan teori dan konsepnya perlu disebutkan di sini. Beberapa teori dan konsep mendasar tersebut menjadi dasar kajian berikutnya.

Pada khasanah pemikiran politik dan filsafat, Arendt membahas anti semitisme, imperialism and totalitarianisme yang telah "melahirkan" *holocaust* di Jerman. Ia melihat banalitas rejim Hillter yang tak bermoral membuat kekerasan merebak, tidak hanya di Jerman tetapi di seluruh Eropa. Pemerintah totaliter yang memiliki akar pada sejarah, telah menghilangkan kategori moral dan makna politik. Rejim totaliter ini berusaha melakukan kontrol total atas kehidupan manusia sekaligus menularkan kekerasannya pada warga negaranya.[71] Dalam konteks ini, masyarakat dalam kediriannya telah kehilangan kepercayaannya terhadap apa pun, perasaan (*senses*) nalar (*reason*), hilangnya akal sehatnya (*common sense*) dan mengalami keterasingan terhadap dunia.[72] Konsep-konsep tersebut menawarkan salah satu jawaban terhadap pertanyaan tentang asal usul praktek kekerasan negara, dimana peran para pelaku, dan di mana masalah keadilan ditempatkan.[73] Pada sisi lain, Edith Stein, seorang filsuf yang menjadi korban kekejaman *holocaust* menempatkan unsur positif terkait kemampuan manusia yakni kemampuan empati dan kemampuan saling mempengaruhi; dan pada wilayah sosial dan negara adalah pengaruh komunitas, dan pengaruh Negara yang ada pada wilayah positif.[74]

---

71 Arendt, Hannah. *The origins of totalitarianism*. Houghton Mifflin Harcourt, [1951] 1973.

72 Arendt, Hannah. "The Human Condition, with an introduction by Margaret CANOVAN." *Trans. Margaret Canovan. Second ed. London: The U of Chicago P* (1998): 280.

73 Pitaloka, Rieke Dyah. "*Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, Yogyakarta". Galang Press, 2004.

74 Marianne Sawicki, "Personal Connections: The Phenomenology of Edith Stein" diunduh dari http://www.library.nd.edu/colldev/subject_home_pages/catholic/personal_connections.shtml pada 21/08/2015

Pada periode 70-an, Dom, Hélder Câmara seorang pendukung teologi pembebasan dari Amerika Latin membahas masalah kekerasan yang berangkat dari ketidakadilan. Ia menyatakan kondisi kemiskinan sebagai kemiskinan yang membunuh. Sama halnya dengan perang, kemiskinan menyebabkan kerusakan fisik, psikis dan moral. Inilah ketidakadilan yang menurutnya menurunkan kualitas hidup manusia ke dalam kondisi sub-human. Ketidakadilan ini bukan monopoli untuk dunia ketiga, juga negara kapitalis, dan negara sosialis tidak memperkenankan adanya pluralisme masyarakat. Struktur ketidakadilan merupakan kekerasan mendasar, kekerasan pertama. Kekerasan yang mapan memunculkan pemberontakan untuk menciptakan dunia yang lebih adil, menjadi kekerasan kedua. Gilirannya akan memunculkan represi penguasa. Dengan demikian berlangsung spiral kekerasan yang daripadanya diperlukan gerakan-gerakan anti kekerasan.[75]

Memori atas konflik dan kekerasan berada pada wilayah antara sejarah dan psikologi, antara mengingat dan melupakan pengalaman pahit antara pilihan mengampuni atau tidak mengampuni para pelakunya. Kajian-kajian yang telah ada –berangkat dari pengalaman *holocaust* – muncul kembali dengan merebaknya berbagai kekerasan di wilayah Bosnia bekas Soviet yang menjadi negara merdeka, sekaligus terlibat dalam kejahatan pemusnahan etnis. Hal serupa juga terjadidi Rwanda, Afrika. Pendekatan bidang politik, filsafat dan teologi terus dilanjutkan. Ditambahkan kajian pada bidang antropologi, psikologi, sejarah, moral. Satu bidang hukum yang berkembang terkait dengan *transitional justice*.[76] Kajian yang marak dan berkembang tersebut, terkait pula dengan usaha-usaha yang dilakukan untuk mendampingi para korban, dan mengantaranya berhubungan dengan para pelaku. Demikian pun masalah perdamaian internasional juga memiliki

75 Câmara, Hélder. *Spiral of violence*. Dimension Books, 1971.

76 Konsep yang berlaku pada Pengadilan Internasional yang mengadili kejahatan kemanusiaan dalam genoside. Prinsipnya, mengembalikan keadilan pada pelaku dan korban, dan pihak ketiga yang mengantarai prosesnya, sekaligus menempatkan diri pada posisi pembelaan terhadap korban.

dimensi tersendiri yang terkait dengan issu-issu pasca konflik semacam ini.[77] Sehingga tidak dipungkiri gerakan *peace building* juga merebak. Menjadikan gerakan internasional dengan berbagai jaringannya untuk menangani masalah serupa yang terjadi di berbagai wilayah.

Pada sisi lain, usaha untuk memahami masalah konflik dan penanganannya juga dapat ditemukan dalam sebuah pendekatan budaya.[78] Lisa Schirch menunjukkan terhadap konflik seperti terlihat dalam tabel berikut[79]:

PENDEKATAN TERHADAP KONFLIK	DESKRIPSI ATAS KONFLIK	PRASYARAT UNTUK INTERVENSI
RASIONAL	• Perebutan atas sumber langka, atau Kasus tertentu	• Mengontrol emosi; • Berpikir analitis atas masalah; • Mengembangkan kemampuan terhadap masalah; • Memisahkan orang dari masalah
RELASIONAL	• Pola komunikasi yang terbatas, • Persaingan, • Kuasa yang tak seimbang, Struktur Sosial	• Memajukan kemampuan komunikasi semua pihak; • Pola Relasi: dari kompetitif ke kerjasama • Mengkritisi ketakseimbangan kuasa; • Orientasi struktur SOS pada kebutuhan
SIMBOLIK	• Perbedaan persepsi, • Budaya, • Pandangan hidup	• Rekonsiliasi sebagai transformasi identitas dan reka ulang konflik; • Kesempatan untuk macam2 ekspresi; • Komunikasi simbolik melalui macam2 ritus, mitos

77 Pendekatan Johan Galtung terhadap konflik: 1. Kodrat - Struktur - Budaya dari yang tak bersalah, 2. Reparasi – Restitusi, 3. Permintaan maaf – Pengampunan, 4. Penintensi (Teologis), 5. Hukuman (Yuridis), 6. Karma (Kodependensi Asali), 7. Komisi Kebenaran, 8. Pelepasan (Ritual), 9. Penyembuhan (bergabung dalam derita), 10. Rekonstruksi Bersama, 11. Resolusi Konflik Bersama, 12. *Ho'o Ponopono*. Johan Galtung, "After Violence, Reconstruction, Reconciliation, and Resolution. Coping with Visible and Invisible Effects of War and Violence", dalam *Reconciliation, Justice, and Coexistence. Theory and Practice*, Mohammed Abu-Nimer (ed), Lexington Books, 2001, hal. 3-24

78 Lisa Schirch, "Ritual Reconciliation. Transforming Identity/ Reframing Conflict", dalam *Reconciliation, Justice, and Coexistence. Theory and Practice*, Mohammed Abu-Nimer (ed), hal 145-161

79 Ibid.

Skema di atas memperlihatkan beberapa pokok: rasionalitas pandangan hidup, dan identitas budaya; persepsi tentang keadilan dan perdamaian itu beragam – secara simbolik; perlunya bergerak di wilayah pandangan-pandangan simbolik, ritus sebagai simpul berbagai pandangan atas koeksistensi, dan rekonsiliasi, ritus itu kondusif untuk transformasi identitas simbolik, ritus bermanfaat untuk membuat konflik menjadi relasi koeksistensi.

Pendekatan-pendekatan tersebut di atas, merupakan usaha untuk memahami dan menempatkan konflik dan kekerasan dari dinamika besar fase-fase berlangsungnya serta menempatkan usaha rekonsiliasi dari fase genesis, dan fase transformasi. Dalam fase tersebut pelaksanaannya tidak sesederhana rumusannya. Sejumlah pengalaman memperlihatkan kekhasan ritus atau mitos yang dapat digali dan dikembangkan pada pengalaman-pengalaman penanganan konflik dan rekonsiliasi telah memperlihatkan hasilnya.[80] Pengalaman di Afrika Selatan[81], Bosnia dan Rwanda[82] masing-masing memperlihatkan kekhasannya. Hal inilah yang dalam penanganan dan pengolahan pengalaman terkait dengan situasi di negeri kita menjadi modal tersendiri untuk belajar. Usaha yang telah dijalankan oleh berbagai pihak perlu dipahami, ditafsir dan dikembangkan sejalan dengan konteksnya.

2. Pengalaman konflik dan kekerasan di Indonesia

Reformasi di Indonesia yang mengikuti runtuhnya rejim Orde Baru di bawah Suharto, diawali sejumlah kekerasan yang merebak di berbagai wilayah di Indonesia dan terus berlangsung setelah memasuki periode Reformasi. Terdapat keragaman perspektif dan pendekatan terhadap fenomena tersebut: ilmu politik, sosiologi, antropologi, teologi dan multidisipliner. [83]

80 Ebrahim Moosa, "Truth and Reconciliation as performance: spectres of Eucharistic redemption", dalam *Looking Back Reaching Forward. Reflection on the Truth and Reconciliation Commision of South Africa*, Charles Villa-Vicencio-Wilhelm Verwoerd (ed.), University of Cape Town Press, 2000, hal. 113-122

81 Charles Villa-Vicencio-Wilhelm Verwoerd (ed.), *Looking Back Reaching Forward. Reflection on the Truth and Reconciliation Commision of South Africa*, University of Cape Town Press, 2000

82 Aryeh Neier, "Rethinking Truth, Justice, and Guilt after Bosnia and Rwanda", dalam *Human Rights in Political Transition: Gettyburg to Bosnia*, Carla Hesse-Robert Post (ed), New York, Zone Books, 1999, hal. 39-52

83 Buku *Teori-teori Kekerasan* yang diedit oleh Thomas Santosa memperlihatkan khasanah kajian tersebut. Thomas Santosa (ed.), *Teori-teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Petra, 2002. Terbitan-terbitan dengan pendekatan baru masih terus berlangsung. Michel Wieviorka, *Violence. A New Approach*, London-California-New Delhi-Singapura: SAGE Publications, 2010

Gerakan *peace building* dan pusat kajian muncul di berbagai tempat, termasuk di sejumlah perguruan tinggi.

A. Kajian akademik atas konflik dan kekerasan di Indonesia

Praktik penanganan dan kajian dari berbagai perspektif dan pendekatan telah menghasilkan sejumlah tulisan dan buku yang telah terbit. Tulisan dan buku yang mengkaji konflik dan kekerasan di Indonesia tersebut memiliki keragaman disiplin ilmu, maupun obyek penelitiannya, diterbitkan oleh lembaga, atau penerbit. Beberapa lembaga di antaranya: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)[84], International Center for Transitional Justice (ICTJ)[85], Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)[86], Satya Wacana[87], PSKP (Pusat Studi Konflik dan Perdamaian (PSKP) UGM. Sejumlah peneliti dan ilmuwan, beberapa diantaranya: Budiawan (politik ingatan)[88] Fadjar Tufail (teori wacana)[89] PM Laksono (antropologi)[90] dan Dyah Larasati (seni pertunjukan)[91].

B. Pendekatan yang diusahakan Pascasarjana USD

Salah satu keprihatinan yang ada dalam dunia intelektual adalah keterpisahan antara dunia perguruan tinggi dari masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pembentukan intelektual publik dipilih oleh kajian Religi dan

84 LSM yang bergerak di bidang penegakan HAM. Menterjemahkan buku-buku terkait sejarah kekerasan dan penanganannya, menyelenggarakan simposium dan penulisan buku tentang sejarah otoritarianisme di Indonesia. Ifdhal Kasim, *Apakah "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi' Itu?*. Briefing Paper Series. Jakarta: Elsam, No. 1, Juli 2000; _____, *Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti?* Jakarta: Elsam, No. 2, Agustus, 2000; *Tutup Buku dengan "Transitional Justice"? Menutup Lembaran Hak Asasi Manusia 1999-2004 dan Membuka Lembaran Baru 2005*, Jakarta: Elsam, 2005

85 LSM yang bergerak di bidang penegakan HAM. *Menghadapi Kekerasan Masa Lalu di Indonesia. Laporan Pemetaan*, ITRJ, 2003

86 Peneliti LIPI terlibat penelitian di sejumlah wilayah. Bekerjasama dengan Marx Planc menyelenggarakan workshop tentang sikap agama berhadapan dengan konflik dan kekerasan. "Religion in Dispute and Conflict Resolution: Cases from Post-New Order Indonesia" Lembang, 18 – 21 Maret 2009

87 Kris Herawan Timotius, *Religious and Ethnic Conflicts in Indonesia: Analysis and Resolution*, Salatiga: Satya Wacana Christian University, 2005

88 Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Suharto*, Jakarta: Elsam, 2004

89 Fadjar Tufail, "Ninja in Narratives of Local and National Violence in Post-Suharto Indonesia" dalam: *Beginning to Remember*, hal. 150-167

90 PM Laksono, (ed), *Ken Sa Fak*

91 Larasati, Rachmi Diyah. *The Dance that Makes You Vanish: Cultural Reconstruction in Postgenocide Indonesia*. University of Minnesota Press, 2013.

Budaya, Program Pascasarjana di Universitas Sanata Dharma.. Pendekatan ini dimaksudkan bisa menjembatani dunia intelektual dan masyarakat yang menjadi subyek keprihatinan. Menempatkan intelektual publik sebagai dan pilihan berarti melakukan kajian yang memberi perangkat dan menempatkan kelompok intelektual untuk berbagi ilmu pengetahuan dengan masyarakat publik. Terkait dengan hal ini, tiga mata kuliah yang pernah ditawarkan terkait dengan masalah etika dan moral, politik, dan estetika adalah sebagai berikut:

1. Teologi Rekonsiliasi Sosial
2. Memori dan Politik Ingatan
3. Estetika dari Wilayah Konflik

B.1. Teologi Rekonsiliasi Sosial

Ilmu Teologi dapat dibedakan dalam *ortodhoksi* dan *ortopraksis*. *Ortodoksi* lebih berkaitan dengan dogma-dogma ajaran agama. Sebagaimana dimengerti secara umum, ilmu teologi bergerak pada bidang pertanggungjawaban iman (*fides querant intellectum*). Sejalan dengan perkembangan teologi pembebasan di Amerika Latin yang mengalami kebuntuan dengan pendekatan teologi Eropa (continental), pendekatan dalam ilmu teologi mengalami pembaruan sehingga geraknya menjadi pendekatan dari bawah, berangkat dari pengalaman. Sehingga yang terjadi bukan lagi *fides querant intellectum*, melainkan orang beriman yang mempertanggung jawabkan tindakannya (ortopraksis). Dengan demikian lebih bergerak di wilayah etika dan moral. Artinya merupakan usaha orang yang mencari pertanggung jawaban atas tindakannya, dan pembahasan tentang baik buruknya tindakan dalam wilayah penilaian moral. Orang beriman sebagai pelaku menempatkan diri sebagai subyek moral. Berarti menjadi orang beriman yang mempertanggungjawabkan tindakannya. Moral bukan melulu terkait dengan moral personal, melainkan juga moral sosial. Berangkatnya dari pengalaman, dan secara khas diwarnai dengan keberpihakan kepada korban. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kuliah, kalau sebelumnya dinamika teologi lintas ilmu, berangkat dari pengalaman kemiskinan, dan ketidakadilan, setelah masa reformasi yang terkait dengan pengalaman ditempatkan pada penanganan konflik dan kekerasan. Untuk itu pada Fakultas Teologi USD pernah diselenggarakan mata kuliah Teologi Rekonsiliasi Sosial.

Momentum perkuliahan tersebut menjadi lebih dinamis, saat di masyarakat berlangsung pula usaha dari berbagai kelompok yang melibatkan diri dalam penanganan kekerasan dan resolusinya. Dalam pengalaman konflik

dan kekerasan, tidak melulu hanya dua pihak; yakni pelaku dan korban tetapi ada pihak ketiga yang turut dan terlibat dan berefleksi atasnya yaitu kelompok yang bekerja dalam penanganan kekerasan dan rekonsiliasi, dan melakukan refleksi atasnya. Demikian pun orang yang berteologi. Mereka tidak steril berada di luar pelaku dan korban. Mereka menempatkan diri sebagai pihak ketiga yang berpihak kepada korban,bertindak sebagai subyek moral, seperti halnya pelaku dan korban menduduki posisi yang sama sebagai subyek moral. Dalam hal ini, teologi bukan hanya memberi sumbangan pada tahap refleksi spiritual atas gerakan konflik dan resolusi yang mengalaminya, tetapi juga bergumul bersama korban.

Keterlibatan yang dilakukan oleh para teolog juga membuka peluang pendekatan dan kerjasama antar agama. Jika dalam teologi yang berorientasi pada ortodoksi cenderung melanggengkan eksklusivitas ilmu sekaligus orang yang mempelajarinya, ortopraksis yang berteologi justru menciptakan interaksi, baik dengan korban maupun pihak-pihak ketiga yang lain. Dari bidang teologi, secara khusus memberi sumbangan pada teologi narasi, karena berangkat dari tuturan korban yang menjadi subyek moralnya. Orang yang berteologi, menempatkan diri bersama dengan korban. Mengolah trauma dan menempatkannya dalam perspektif sejarah keselamatan. Menempatkan iman, di mana Tuhan turut bertindak. Dalam posisi tersebut, masalah rekonsiliasi (pendamaian) menjadi pergumulan yang menjadi tatapan dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pertanggung jawabannya ditempatkan di dalam narasi.Mengingat narasi menjadi ekspresi penting, perangkat keilmuan yang terkait dengan naratologi, pemilihan plot, alur dan jalinan kisah menjadi sarana di mana pihak ketiga menjadi pihak yang turut membangun narasi dari korban.[92]

B.2. Politik Ingatan yang bergerak di wilayah Identitas

Kekerasan yang dialami korban menorehkan bekas dalam ingatan. Mereka terus bergumul dengan penderitaan, luka dan stigma yang sering direproduksi dalam masyarakat. Bagaimana hal tersebut bisa dipahami dan ditempatkan? Bagaimana mekanismenya berlangsung dan dihadapi? Melalui pemahaman tentang politik ingatan, permasalahan tersebut bisa didekati dan diolah.

92 Terkait dengan hal tersebut muncul sejumlah tulisan dalam Jurnal Mahasiswa Teologi USD *Fenomena* Vol. III, No. 1, 2006 . Juga dalam buku A. Sumarwan, *Menyeberangi Sungai Air Mata*, Yogyakarta: Kanisius, 2007

Tuntutan untuk bersikap atas pengalaman yang menjadi trauma dapat ditempatkan pada beberapa kemungkinan yang akan membentuk identitas dengan pertimbangan etisnya. Pilihan sikap dasar berada dalam kemungkinan-kemungkinan berikut: t*o forgive and to forget, to forgive but not to forget,not to forgive but to forget,* dan *not to forgive and not to forget*. Beberapa sikap tersebut merupakan kemungkinan pilihan beserta implikasi praksisnya, disertai dengan rasionalitas tindakan yang akan mengikutinya. Beberapa pengalaman kekerasan di Indonesia dalam beberapa dekade berselang telah meninggalkan trauma pada para korban yang mengalaminya, atau pun pelaku sebagai pihak yang digugat, dan pihak ketiga yang memberi perhatian kepada nasib korban dan tuntutan penyelesaiannya. Beberapa kelompok korban dan para pendampingnya membentuk komunitas-komunitas yang terus memperjuangkan rehabilitasi serta pengembalian hak-haknya untuk menghadapi stigmatisasi, sekaligus mengolah trauma yang masih bercokol.

Dari gerakan komunitas-komunitas tersebut, ada beragam cara pedekatan dan pengolahan atas pengalaman konflik dan kekerasan. Inilah yang menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dengan memilih pengalaman di wilayah dan komunitas tertentu. Pengolahan dapat dilakukan dengan menempatkan pengalaman subyek tertentu yang membentuk identitas dengan pemaknaannya yang ada. Dari perkuliahan dengan tema ini, sejumlah mahasiswa telah menjadikannya sebagai kajian tesis dan beberapa di antaranya telah diterbitkan sebagai buku. [93]

B.3. Estetika dari Wilayah Konflik

Wilayah seni juga mengajukan pendekatan dan mengkaji konflik dan kekerasan. Hal ini mewujud dalam mata kuliah yang ditawarkan di IRB sebagai "Estetika dari Wilayah Konflik". Pertimbangannya, dari berbagai tempat dan periode yang berlainan, ada beragam karya seni (musik, pertunjukan dan visual) yang menyimpan ingatan sekaligus mengkespresikan pengalaman konflik dan kekerasan yang pernah berlangsung. Mata kuliahnya berfokus pada pemahaman representasi ingatan dengan memahami estetika di

93 Lokasi dan komunitasnya tersebar di Jawa Tengah, Jakarta, Poso, Maluku, Timur Leste. Pendekatannya beragam: peran media, agama, gender dan anak-anak. Tema-tema tesis: Peran Pers di Wilayah Konflik Maluku, Perempuan dan Anak-anak korban di Poso, Penduduk yang memeluk Agama setelah Peristiwa 1965 di Salatiga, Pandangan Islah dari Korban Peristiwa Priok 1984, Pengungsi Timor Leste di Timor Barat, Relawan Pendamping Korban Perkosaan Kerusuhan Jakarta 1998. Tesis yang terbit menjadi buku: *Peran pers Maluku*, *Pertobatan di Boyolali*, *Suara perempuan dan Anak di Poso*.

daerah konflik di berbagai negara. Di dalamnya, pengampu dan mahasiswa mempelajari nilai kemanusiaan secara kritis dalam wacana global.

Beberapa pokok yang menjadi dasar, pertama, istilah 'kekerasan' dalam wacana estetika dipandang tidak saja sebagai referensi sumber dan ingatan sosial. Sekaligus juga menjadi sumber filosofi dan inspirasi dalam memahami sisi materialnya. Kedua, istilah konflik dan pasca perang digunakan untuk mendeteksi sebuah nilai khusus yang mewacanakan hal-hal yang terkait dengan pengalaman tertentu, memiliki cakupan khusus berhubungan dengan lokasi, waktu, dan pelaku seni yang terlibat dan berperan, serta interpretasi publik. Unsur-unsur tersebut memediasi pemahaman-pemahaman yang terkait dengan kekerasan dan konflik yang terjadi, dan mediasinya secara estetik, serta diinterpretasi melalui karya seni yang disajikan dan diperdengarkan. Pendekatan yang digunakan melalui eksplorasi teori dan pendekatan estetika post kolonial, *cultural production*, *memory*, *gender politics* dan *neoliberalism*, *representasi, appropriasi* dan *textuality*. Di dalamnya juga terkait memahami estetika dalam relasinya dengan wacana sosial, politik memori serta studi tentang *border* yang dipahami secara *transient* dalam wacana ilmu kajian budaya dan penerapannya secara hukum international dalam konteks negara (*state*).

Ada beberapa pandangan terkait dengan estetika. Utamanya terkait dengan emosi, penalaran, dan pemaknaan, serta konsep tentang seni. Estetika dalam konteks ini dipandang sebagai metodologi cara pandang yang diharapkan mampu memediasi tujuan, agenda karya dan merefleksikan kondisi pelaku seni secara kontekstual. Estetika menjadi pilihan sikap dan cara mengingat, melalui ekspresi seni yang sekaligus berfungsi menjadi penggerak perubahan sosial. Ada beragam perlakuan tersimpan dalam pengalaman. Tubuh yang mengalami adalah teks, tubuh politik. Berada dalam posisi menjadi monumen. Kehadirannya menjadi sejarah. Memerankan diri sebagai sejarah yang terus dapat berbicara.

Estetika dari wilayah konflik dikembangkan sebagai bagian dari strategi berhadapan dengan trauma dan stigmatisasi yang dikombinasikan dengan sejumlah konsep yang berkembang terkait dengan globalisasi, dan identitas. Dengan demikian, trauma dan stigma ditempatkan sebagai pengalaman yang diolah di dalam arus sejarah yang berjalan dan berbagai pengaruh yang melanda, baik terkait dengan pengaruh kebijakan pemerintah maupun pengaruh masyarakat dan dunia luas yang hadir dalam gelombang globalisasi. Dengan cara itu, "Estetika dari wilayah konflik" merupakan sebuah pilihan tindakan yang berpihak pada korban, merekam praktik yang

telah terjadi dan mewacanakannya sebagai kajian ilmiah. Kekayaan praktik di sejumlah tempat dalam lingkup nasional maupun global membentuk cakrawala baru. Praktik yang telah menjadi kajian dipakai sebagai referensi dan inspirasi untuk memasuki wilayah setempat yang belum mendapat kesempatan dikenali, diinventarisir, dan akhirnya dikembangkan di dalam wacana. Dengan cara ini, keterlibatan dunia akademik semakin berkembang dan sekaligus membumi, dirasakan dampaknya bagi masyarakat. Referensi atas hal-hal yang disebut di atas mencakup beberapa pengalaman yang ada di wilayah Afrika, Amerika Latin, maupun kaum imigran yang datang dan bermukim di Eropa. [94]

4. Karya dan kajian yang masih terus berlanjut

Sejumlah pihak terus bergerak menggeluti pengalaman di dalam wilayah-wilayah konflik dan kekerasan serta usaha rekonsiliasinya. Sejumlah akademisi pun bergerak pada bidang-bidang tersebut. Demikian pun juga, dalam bidang Estetika dari Wilayah Konflik masih terus berlangsung sebagai praktik di Indonesia. Antara lain terkait dengan bidang musik, film, seni rupa dan seni pertunjukan. Munculnya beberapa film dengan kisah dan latar belakang etnis Tionghoa seperti *Cau bau Kan*, *Gie*[95]dan beberapa yang lain merupakan karya-karya yang merumuskan identitas sebagai bagian dalam mengungkap trauma dari masa lalu. Dalam bidang sastra telah dimulai oleh Pramudya Ananta Toer dengan salah satu karyanya *Nyanyi Sunyi Saksi Bisu* dan berlanjut dengan novel-novel kontemporer karya sastrawan lainnya Seperti *Candik Ayu (*Tinuk R. Yampolski*)*, *Amba* (Laksmi Pamuntjak) untuk korban 65, *Putri Cina* (Sindhunata) untuk korban etnis Tiong Hoa. Karya dalam bidang seni rupa dapat kita lihat dari karya-karya FX Harsono[96], dan untuk bidang seni pertunjukan telah dikaji oleh Dyah Larasati, salah satunya dalam buku "*The Dance which Makes You Vanish*".

Demikianlah, kajian terhadap masalah konflik dan kekerasan telah, sedang dan masih akan dilakukan oleh berbagai pihak. Lembaga pendidikan jelas

94 Awam Amkpa, "A State of Perpetual Becoming: African Body as Texts, Methods, and Archives" dalam *Dance Research Journal* No 42/1 Summer 2010, hal. 83-88; Michel-Rolph Trouillot, *Silencing the Past*, Boston: Beacon Press, 1995; Hakim Abderrezak, "Burning the sea: clandestine migration across the strait of Gibraltar in Francophone moroccan *illiterature*'" dalam *Contemporary French and Francophone Studies* Vol. 13, No. 4, September 2009, hal. 461-469;

95 Ariel Heryanto "Citizenship and Indonesian ethnic Chinese in post-1998 films" dalam: *Popular Culture in Indonesia Fluid identities in post-authoritarian politics*, Ariel Heryanto (ed), London New York: Routledge, 2008, hal. 70-92

96 Lihat buku F.X. Harsono, *Repetisi/ posisi*, Jakarta, 2010.

tidak bisa menjauhkan diri dari realitas tersebut. Oleh karenanya, lembaga pendidikan harus menghadirkan diri sebagai pembentuk intelektual publik yang terlibat pada pergulatan masyarakatnya.

Daftar Pustaka

Arendt, Hannah. (1973). *The origins of totalitarianism*. Houghton Mifflin Harcourt.

Arendt, Hannah. (1998). "The Human Condition, with an introduction by Margaret CANOVAN." *Trans. Margaret Canovan. Second ed. London: The U of Chicago*

Pitaloka, Rieke Dyah. "*Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat"*, Yogyakarta: Galang Press, 2004.

Ebrahim Moosa. (2000). "Truth and Reconciliation as performance: spectres of Eucharistic redemption", dalam *Looking Back Reaching Forward. Reflection on the Truth and Reconciliation Commision of South Africa*, Charles Villa-Vicencio-Wilhelm Verwoerd (ed.), University of Cape Town Press.

Marianne Sawicki, "Personal Connections: The Phenomenology of Edith Stein" diunduh dari http://www.library.nd.edu/colldev/subject_home_pages/catholic/ personal_connections.shtml pada 21/08/2015

Charles Villa-Vicencio-Wilhelm Verwoerd (ed.) (2000). Looking Back Reaching Forward. Reflection on the Truth and Reconciliation Commision of South Africa, University of Cape Town Press.

Aryeh Neier (1999). "Rethinking Truth, Justice, and Guilt after Bosnia and Rwanda", dalam Human Rights in Political Transition: Gettyburg to Bosnia, Carla Hesse-Robert Post (ed), New York, Zone Books.

Thomas Santosa ed. (2002), Teori-teori Kekerasan, Jakarta: Ghalia Indonesia dan Universitas Petra, 2002.

Michel Wieviorka (2010). Violence. A New Approach, London-California-New Delhi-Singapura: SAGE Publications, 2010

Ifdhal Kasim (2000) Apakah "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi' Itu?. Briefing Paper

Timotius K. H. (2005). Religious and Ethnic Conflicts in Indonesia: Analysis and Resolution, Salatiga: Satya Wacana Christian University.

Budiawan (2004). Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Suharto, Jakarta: Elsam.

Thufailn Fadjar. (2005). "Ninja in Narratives of Local and National Violence in Post-Suharto Indonesia" dalam *Beginning to Remember: The Past in the Present Indonesia*,

Laksono, P. M. ed. (2004). Ken Sa Fak : Benih-Benih Perdamaian dari Kepuluauan Kei. Yogyakarta: Nen Mas II.

Larasati, R. D. (2013). The Dance that Makes You Vanish: Cultural Reconstruction in Postgenocide Indonesia. University of Minnesota Press.

Sumarwan (2007). *Menyeberangi Sungai Air Mata*, Yogyakarta: Kanisius.

Amkpa A. (2010). "A State of Perpetual Becoming: African Body as Texts, Methods, and Archives" dalam Dance Research Journal No 42/1 Summer 2010.

Trouillot Michel-Rolph (1995). Silencing the Past, Boston: Beacon Press, 1995

Hakim Abderrezak (2009), "Burning the Sea: Clandestine Migration across the Strait of Gibraltar in Francophone Moroccan Illiterature'"dalam Contemporary French and Francophone Studies Vol. 13, No. 4.

Ariel Heryanto. (2008). "Citizenship and Indonesian ethnic Chinese in post-1998 films" dalam: Popular Culture in Indonesia Fluid identities in ost-Authoritarian Politics, Ariel Heryanto (ed), London New York: Routledge.

Harsono F. X, Repetisi/ posisi, Jakarta, 2010.